

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN TANGGUNG  
JAWAB PELAKU USAHA MINUMAN DALAM KEMASAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Harry Christian Lumban Tobing**

**Abstract :** *The use of drinking water through source water in the soil is increasingly unlikely because of the depleting ground water supply and pollution. For that improved business prospects of drinking water in containers (AMDK) which include drinking water product so that it becomes an alternative for the community in meeting the needs of clean water that is safe to be consumed per day. Problems often faced by consumers with regard to any AMDK regarding health standards do not comply with the provisions of which have been set out in the decision of the Minister of health No. 907/Menkes/SK/VII/2002 about terms and monitoring the quality of drinking water.*

Kata Kunci : Pelaku Usaha AMDK, UU No.8/1999, Perlindungan Konsumen.

## **PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan perekonomian telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh pasar yang merupakan pemenuh kebutuhan masyarakat. Kondisi ini memberikan kemudahan dan kebebasan bagi konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Begitu pula, kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari semakin meningkat.

Rendahnya kualitas dan kuantitas air yang berasal dari PDAM khususnya kota Medan diakibatkan karena air yang selama ini dipenuhi dengan sumber air sumur atau sumber air dalam tanah semakin menipis, kerusakan alam dan pencemaran. Kendala-kendala inilah yang kemudian menjadi cikal bakal meningkatnya prospek usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang memasukkan produk air minum sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari.

Hal ini sangat wajar karena selain praktis dan efisien, produk AMDK terjaga kebersihan dan keamanannya dengan memiliki kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuannya adalah melindungi masyarakat dan juga untuk mendorong peningkatan persaingan usaha yang sehat, keselamatan konsumen dan melestarikan fungsi lingkungan

hidup.<sup>1</sup> Dengan tercantumnya label SNI maka AMDK merupakan produk yang aman untuk dikonsumsi dan telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Seiring dengan semakin populer dan menjamurnya usaha AMD isi ulang ini, timbul beberapa permasalahan terutama mengenai kualitas AMD isi ulang. Kualitas AMD isi ulang ini yang menjadi tolak ukur apakah air minum yang berasal dari AMD isi ulang ini layak dikonsumsi atau tidak. Pelanggaran-pelanggaran juga banyak terjadi atau dilakukan oleh depot air minum isi ulang khususnya di kota Medan, yang berupa pelanggaran dalam hal perizinan serta pelaporan secara berkala mengenai kualitas ke higienisan serta sanitasi lingkungan depot air minum isi ulang yang akan dijual kepada masyarakat.

Permasalahan lain yang tak kalah penting juga muncul berkaitan dengan pemberian label merek serta Segel pada kemasan produksi air minum isi ulang, pemasangan label SNI pada kemasan padahal kenyataannya belum mendapatkan SNI, tidak memenuhi standar sanitasi yang baik dalam proses produksinya.<sup>2</sup>

Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>3</sup> Hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap penting keberadaannya. Banyak orang yang tidak menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen cenderung mengambil sikap, diam. Selain itu, permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen.<sup>4</sup>

Sebagai konsumen, masyarakat juga harus mengerti benar bagaimana AMD isi ulang yang dikonsumsi, apakah depot air minum isi ulang tersebut telah menggunakan sanitasi yang baik, apakah telah memenuhi syarat dan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berkaitan, dan yang terutama apakah telah sesuai dengan kualitas SNI.

---

<sup>1</sup> Faizal, *AMDK Wajib SNI, Melanggar Kena Sanksi*, dikutip dan <<http://almicro.com/blo,g/air%20minum/amdk-wajib-sni-mcianggar-kena-sanksi>>, diakses tanggal 2 September 2011.

<sup>2</sup> Yogya Online, *Banyak Depot Air Minum yang Tidak Memenuhi Standar Sanitasi*, dikutip dari <<http://yogyaonline.net/kesehatan/banyak-depot-air-minum-yang-tidak-memenuhi-standar-sanitasi.html>>, diakses tanggal 2 September 2010.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 12.

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 17.

Dilihat dari UUPK maka terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, serta hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi produk, masalah label dan pencantuman komposisi serta tanggal kadaluarsa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha AMDK.

### **Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang penulisan diatas maka pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah permasalahan yang dihadapi konsumen air minum dalam kemasan?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi konsumen air minum dalam kemasan?
3. Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi terkait terhadap produk air minum dalam kemasan?
4. Bagaimanakah penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha?

### **Permasalahan yang Dihadapi Konsumen Air Minum dalam Kemasan**

Usaha AMDK merupakan salah satu bidang usaha penyedia air minum bagi masyarakat. AMDK belakangan ini merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif air minum yang praktis dan efisien. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya AMDK yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Pelanggaran mengenai standar kesehatan ini mengakibatkan produk AMDK yang dihasilkan tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan seperti diare dan sakit perut atau bahkan yang lebih ekstrim berujung pada kematian.

## **Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Air Minum dalam Kemasan**

Untuk dapat melindungi konsumen yang hak-haknya dirugikan dalam hal ini konsumen AMDK, perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur dan terutama melindungi konsumen dari kerugian, yaitu dengan upaya penyediaan produk peraturan hukum yang mampu melindungi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dan berwenang misalnya pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), YLKI dan pihak-pihak lainnya.

Khusus mengenai konsumen AMDK, produk-produk hukum tersebut sebenarnya telah tersedia, yang dapat dijadikan sebagai pelindung hukum bagi konsumen AMDK. Adapun ketentuan peraturan-peraturan yang terkait dengan AMDK dan izin pendiriannya, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian  
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi dari penggunaannya (Pasal 1).  
Setiap pendirian industri baru maupun perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri (Pasal 13).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan  
Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standard an/atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 21 ayat (31)).
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  
Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan barang apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan dilarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia (Pasal 16).  
Setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia; pangan yang mengandung cemaran melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan (Pasal 21).

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan (Pasal 8 ayat (1) huruf a).
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air  
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak (Pasal I huruf c).
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum  
Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Pasal 1 ayat (1)).  
Jenis air minum meliputi air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, air yang didistribusikan melalui tangki air, air kemasan, air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat, harus memenuhi kesehatan air minum (Pasal 2 ayat (1)).  
Persyaratan kesehatan air minum harus memenuhi persyaratan bakteriologis, kimiawi, fisika dan radioaktif sebagaimana ditetapkan dalam lampiran (Pasal 2 ayat (2) dan (3)).
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 634/MPP/Kep/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar  
Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi standar mutu dilakukan oleh menteri (Pasal 4 ayat (1) huruf a).  
Pengawasan pemenuhan ketentuan standar mutu dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, yang telah diberlakukan SNI wajib atau standar lain yang telah dipersyaratkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau menteri teknis lainnya (Pasal 5 ayat (1))
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516).  
Perlindungan hukum yang diberikan UUPK serta peraturan terkait seperti

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum serta peraturan-peraturan yang lainnya di atas dapat dijadikan pedoman dalam hal pengawasan kualitas AMDK yang dikonsumsi oleh masyarakat yang harus juga dilakukan dengan peran serta pemerintah, masyarakat juga pihak-pihak terkait yang termasuk di dalamnya guna mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan sesuai serta keberlangsungan usaha yang ada di masyarakat.

Peningkatan kesadaran Hukurn Konsumen ini, sebaiknya tidak hanya oleh konsumen tetapi juga perlu campur tangan pemerintah khususnya dalam hal pengawasan intensif terhadap tempat pengelolaan AMDK atau dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada konsumen misalnya mengenai syarat kualitas AMDK yang baik dan sehat dalam hal ini dapat berupa kegiatan sosialisasi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum sehingga dapat pula meningkatkan pemahaman konsumen mengenai standar AMDK yang baik sehingga dapat mengantisipasi timbulnya dampak yang merugikan kesehatan akibat AMDK yang dikonsumsi.

#### **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dan Instansi Terkait terhadap Produk Air Minum dalam Kemasan**

Salah satu tugas Kementerian Kesehatan yang cukup penting adalah melindungi masyarakat dari berbagai kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan masyarakat, dalam hal ini penyakit yang disebabkan AMDK yang tercemar bakteri. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dapat melakukan pengawasan mengenai kualitas dari AMDK tersebut yang harus memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 di mana AMDK memenuhi syarat fisik, kimia dan bakteriologi. Jika AMDK tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dikelola secara benar maka akan berdampak buruk terhadap kesehatan dan menimbulkan penyakit diare, *tifoid*, hepatitis atau keracunan.

Selain itu pengawasan juga dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden serta berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan.<sup>5</sup> BPOM dibentuk di tingkat pusat sedangkan di tingkat daerah dibentuk Unit Pengelola Teknis BPOM.

Peran BPOM dalam hal pengawasan ini adalah upaya antisipasi terhadap penggunaan kimia berbahaya dalam AMDK yang dikonsumsi masyarakat. BPOM bertugas menguji kandungan bahan kimia yang terdapat dalam sampel AMDK tersebut dan kemudian menindaklanjutinya yaitu dengan menentukan apakah AMDK tersebut telah memenuhi standar kesehatan dan layak dikonsumsi atau tidak sama sekali. Dalam hal ini sampel yang diuji laboratorium oleh BPOM merupakan hasil kerja sama atau temuan awal kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinkes.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga merupakan wadah yang melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha AMDK. LPKSM merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan melindungi hak-hak konsumen. Inisiatif pembentukan LPKSM ini berasal dari masyarakat sendiri sebagai wujud rasa keprihatinan melihat kondisi konsumen di Indonesia yang belum memperoleh perlindungan secara maksimal dan agar pergerakan perjuangan hak-hak konsumen dapat dilakukan secara terorganisir.<sup>6</sup>

Secara tegas Pasal 1 angka 9 UUPK menguraikan pengertian LPKSM sebagai lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Apabila dilihat dari definisi tersebut, LPKSM merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memusatkan aktivitasnya guna memberikan perlindungan terhadap konsumen. Walaupun sebagai lembaga non-pemerintah, LPKSM harus mendapat pengakuan dari pemerintah dengan tugas-tugas yang masih harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>5</sup> Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen.

<sup>6</sup> Dedi Harianto, *op. cit.*, hal. 92.

Adapun tugas-tugas LPKSM sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UUPK meliputi kegiatan:

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dalam kaitannya dengan AMDK, jika didapati kecurangan dengan adanya usaha AMDK, maka LPKSM dapat menyuarakan kepentingan konsumen dengan meminta konfirmasi pada pihak-pihak yang terlibat dan mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Semakin beragam tindak pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha menuntut pemerintah untuk selain melakukan pembinaan juga meningkatkan pengawasan pelaksanaan perlindungan konsumen. Hal tersebut dilaksanakan dengan turut melibatkan partisipasi masyarakat dan LPKSM untuk lebih menjamin terlaksananya perlindungan terhadap konsumen.

### **Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha**

Seperti pada umumnya pendapat orang, sesuatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu tentang hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedang yang lain tidak merasa demikian. Oleh karena itu batasan sengketa konsumen adalah “sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu”.<sup>7</sup>

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat

---

<sup>7</sup> A.Z. Nasution, *op. cit.*, hal. 221.



mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”.

#### 1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Di dalam Pasal 45 ayat (4) UUPK menyebutkan “jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”. Ini berarti penyelesaian di pengadilan pun tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara nonpengadilan dapat melakukan alternatif resolusi masalah atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ke BPSK, LPKSM, Direktorat Perlindungan Konsumen di bawah Departemen Perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.

##### a). Penyelesaian Sengketa secara Damai

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) UUPK tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK, dan tidak bertentangan dengan UUPK. Penyelesaian sengketa secara damai membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Dasar hukum penyelesaian tersebut dapat dilihat dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1851-1854 tentang perdamaian (*dading*) dan dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47 UUPK.

##### b) Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga khusus yang dibentuk oleh undang-undang yaitu BPSK. UUPK membentuk suatu lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen yaitu PSK. Pasal 1 angka 11 UUPK menyatakan BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 74.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen dibentuk Majelis yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 54 ayat (1) dan (2)). Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat (3)). BPSK wajib menjatuhkan putusan selama-lamanya 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan diterima (Pasal 55). Keputusan BPSK itu wajib dilaksanakan pelaku usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diterimanya, atau apabila ia keberatan dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat, namun para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk diputus. Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan sengketanya di peradilan umum.

### a) Penyelesaian Melalui Mekanisme Hukum Perdata

Dalam bagian ini sengketa konsumen yang dibahas dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya suatu sengketa/perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu pelaku usaha ataupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas Hukum Perdata yang tidak dapat bekerja di antara pihak secara sukarela.<sup>9</sup> Dalam kasus perdata di pengadilan negeri, pihak konsumen yang diberikan hak untuk mengajukan gugatan.

### b) Penyelesaian Melalui Mekanisme Hukum Pidana

Pengaturan hukum positif dalam lapangan Hukum Pidana secara umum terdapat dalam KUH Pidana yang berlaku atas unifikasi sejak 1918. Karena perkembangan politik, dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tujuan unifikasi tersebut baru dicapai.

Pasal 45 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sebagaimana juga diketahui bahwa tiap aturan pidana berlaku terhadap setiap orang atau badan usaha yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Dalam KUH Pidana tidak disebut kata “konsumen” secara spesifik. Kendati demikian, secara implicit dapat ditarik beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, antara lain:

---

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.*, hal. 175.

1. Pasal 204 : Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.  
Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Pasal 205 : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 300,- (tiga ratus rupiah). Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Pasal 359 : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun (LN 1906 No. 1).
4. Pasal 360 : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 300,- (LN 1960 No. 1).
5. Pasal 382 bis : Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian konkuren-konkurensya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah).

6. Pasal 383 : Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan. menggunakan tipu muslihat.
7. Pasal 386 : Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena dicampur dengan sesuatu bahan lain.
8. Pasal 390 : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau Surat-Surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
9. Khusus dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap pengelola penyedia air minum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.
10. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.<sup>10</sup> Tindakan administratif dapat dilakukan terhadap tenaga kesehatan dan/atau sarana kesehatan yang melanggar undang-undang. Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas terlihat bahwa departemen atau lembaga pemerintah menjalankan tindakan administratif berupa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dengan perilaku tertentu dalam melaksanakan perundang-undangan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 73 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.*, hal. 85-86.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian – uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya AMDK yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
2. Perlindungan hukum yang diberikan UUPK serta peraturan terkait seperti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan konsumen dalam melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai akses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya.
3. Tugas pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengkoordinasikan bersama menteri-menteri teknis terkait, sebagaimana telah diatur dalam 2 (dua) pasal terpisah, yaitu Pasal 29 UUPK untuk pembinaan yang dimaksudkan untuk membina konsumen untuk memperoleh haknya dan Pasal 30 UUPK untuk pengawasan. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat berupa upaya perdamaian di antara mereka yang bersengketa dan juga termasuk penyelesaian melalui BPSK. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan melalui mekanisme Hukum Perdata, Hukum Pidana atau Hukum Administrasi Negara.

### **Saran**

Produk AMDK yang dihasilkan hendaknya dapat sesuai dengan standar kesehatan yang ada, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak negatif terutama dalam hal kesehatan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang terhadap produk AMDK yang telah dikonsumsi. Pengetahuan tentang AMDK yang baik dan sehat pada masyarakat dapat melindungi diri sendiri dan mempertahankan haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia jasa kebutuhan konsumen.

Hendaknya pemerintah dan badan-badan terkait lainnya dapat lebih pro aktif dalam membina dan mengawasi pelaku usaha AMDK agar dapat mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada khususnya untuk masalah kesehatan sehingga AMDK yang dikonsumsi oleh masyarakat menjadi produk yang higienis dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hariato, Dedi, 2007, *Disertasi :Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Periklanan yang Menyesatkan*. Sekolah Pasca Sarjana USU. Medan
- Ikhsan, Edy dan Mahmul Siregar, 2011, *Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum USU. Medan
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta
- Moleong, Lexy J., 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nasution, A.Z., 1999, *Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No. 8/1999-LN 1999.42*. Daya Widjaya. Jakarta
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implikasinya*. Kencana. Jakarta
- Sidabalok, Janus, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mulyadi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

### Internet

- <http://klm-micro.com/blog/air%20minum/amdk-wajib-sni-melanggar-kena-sanksi>, diakses tanggal 2 September 2011
- <http://yogyaonline.net/kesehatan/banyak-depot-air-minum-yang-tidak-memenuhi-standar-sanitasi.html>, diakses tanggal 2 September 2010

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Wan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri

Keputusan Presiders Nomor 42 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat- syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar